

Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Terhadap Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi NTT

Author:

Aryo Irvan Tode¹, Nikson Tameno², Maria P.L. Muga³

¹Universitas Nusa Cendana Kota Kupang, Indonesia
Email: aryoirvan17@gmail.com

²Universitas Nusa Cendana Kota Kupang, Indonesia
Email: niksontameno@gmail.com

³Universitas Nusa Cendana Kota Kupang, Indonesia
Email: maria.muga@staf.undana.ac.id

History of article: Received: 29 Juli 2024, Revision: 12 Agustus 2024, Published: 31 Agustus 2024
DOI: 10.33197/jabe.vol10.iss02.2024.2209

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan terhadap defisit APBD di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode regresi panel dengan pendekatan kuantitatif, memanfaatkan data anggaran dan belanja nyata dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur yang diperoleh dari situs resmi DJPK RI. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. DJPK merupakan salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tugas utamanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa. Pengumpulan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap defisit APBD. Namun, Belanja Daerah dan Penerimaan Pembiayaan masing-masing memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap defisit tersebut. Analisis simultan menunjukkan bahwa Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan secara bersama-sama berdampak signifikan terhadap defisit APBD.

Keywords: *Balance Fund, Regional Expenditure, Financing Revenue, APBD Deficit*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, daerah otonom memiliki hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Dalam implementasinya, otonomi daerah dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperbaiki struktur keuangan daerah untuk pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan publik untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ([Bahasoan et al.](#), 2024).

Berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat dilihat dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam APBD pemerintah daerah tersebut, PAD tersebut mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam hal pembiayaan dan pembangunan di daerahnya ([Dianniar](#), 2023). Pada dasarnya, semakin besar kontribusi PAD dalam

APBD diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui pengurangan dana perimbangan yang biasanya digunakan jika pemerintah daerah kekurangan dana dalam hal peningkatan belanja daerah (Putra & Hidayat, 2016).

Salah satu tujuan peningkatan belanja daerah adalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerataan yang sebaik mungkin (Imamah et al., 2020). Data pendapatan digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi kondisi ekonomi suatu daerah setiap tahunnya, dimana salah satu indikator untuk membantu mengevaluasi hal tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) jadi sumber daya ekonomi suatu daerah dapat dikatakan baik ataupun besar jika nilai PDRBnya pun baik ataupun besar.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri dari 1 kota dan 22 kabupaten, sebagai salah satu daerah otonom pemerintah daerah kabupaten/kota NTT pastinya berupaya untuk menciptakan kemakmuran bersama melalui pertumbuhan ekonomi yang merata sesuai dengan tujuan otonomi tersebut. NTT menjadi salah satu provinsi dengan tingkat desentralisasi yang paling rendah atau dengan kata lain tingkat kemandirian maupun PAD-nya masih tergolong rendah.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari website resmi DJPK RI, terdapat 8 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang mengalami defisit APBD paling banyak sepanjang tahun 2016-2022, yakni Kota Kupang, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Malaka sebanyak 6 kali sedangkan 5 Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka sebanyak 5 kali. Defisit APBD terendah terdapat pada Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 sebesar Rp0,59 Miliar dan Defisit APBD terbesar terdapat pada tahun 2022 di Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp238 Miliar.

Tabel 1. Tingkat Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi NTT (Dalam Miliaran Rupiah)

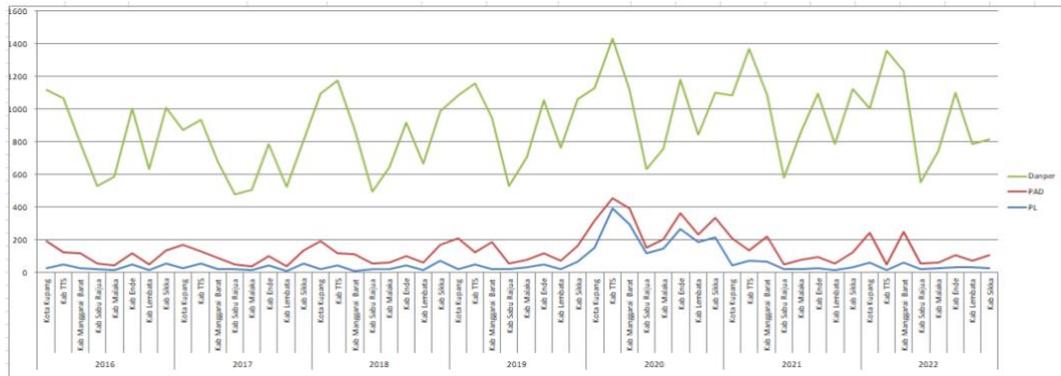
No.	Kab/Kota	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		P	B	P	B	P	B	P	B	P	B	P	B	P	B
1	Kota Kupang	1142	1174	1157	1158	1170	1177	1165	1178	1129	1146	1081	1100	1067	1043
2	Kab TTS	1202	1301	1412	1393	1446	1500	1505	1497	1432	1446	1370	1403	1401	1414
3	Kab Manggarai Barat	882.1	902.8	1015	1052	1053	1050	1164	1160	1116	1151	1090	1099	1256	1494
4	Kab Sabu Raijua	557.4	589.7	536.6	448.6	562.9	556.2	626.4	648.31	631.56	639.78	583.8	643.38	568.43	577.42
5	Kab Malaka	658.5	706	823.5	826.4	753.8	772.78	840.57	979.92	760.11	809.55	863.6	795.04	765.1	795.88
6	Kab Ende	1157	1145	1105	1193	1097	1107	1258	1229	1182	1208	1097	1098	1128	1146
7	Kab Lembata	739.3	785.4	731.6	738.4	794	795.15	912.33	926.5	841.19	834.82	786.6	800.15	802.92	920.2
8	Kab Sikka	1067	1097	1042	1070	1120	1134	1240	1218	1102	1122	1123	1112	833.95	1163

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Pendapatan Daerah tertinggi terdapat pada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 sebesar Rp1505 Miliar dengan surplus sebesar Rp8 Miliar. Pengeluaran pemerintah daerah dalam hal Belanja Daerah harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi makro daerah tersebut. Peningkatan Belanja Daerah dapat menyebabkan defisit anggaran meningkat (Ulum & Gisela Syaputri, 2021).

Tingkat Belanja Daerah tertinggi juga terdapat pada Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebesar Rp1500 Miliar. Hal ini mengidentifikasikan bahwa sepanjang tahun 2016-2022 di 8 Kota/Kabupaten tersebut, pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten TTS sedang berupaya untuk mengoptimalkan Belanja Daerah guna untuk mendukung sektor-sektor produktif yang ada maupun untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya tidak dapat ditunjang dengan pendapatan daerah sehingga Kabupaten TTS harus mengalami defisit sebesar Rp54 Miliar.

Agar menutupi suatu kekurangan didalam kebutuhan pemerintah daerah perlu memakai Dana perimbangan, tujuan dari memberikan Dana perimbangan tersebut agar dapat mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan juga meningkatkan kapasitas daerah didalam menggali potensi ekonomi pada aspek hubungan pemerintah pusat serta daerah (Nisa Batu Bara et al., 2022).



Gambar 2. Jumlah PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya dalam Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prov NTT Tahun 2016-2022 (Dalam Miliaran Rupiah)

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Ditelusuri dari grafik di atas, maka diketahui bahwa dana perimbangan memiliki kontribusi yang paling besar dalam pendapatan daerah Kabupaten/Kota Prov NTT dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya sebesar 85%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada Pemerintah Pusat ([Digdowiseiso & Kaliwattu, 2023](#)). Ketidakterhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan otonomi daerah ditandai dengan tingkat PADnya ([Fitriani et al., 2019](#)) yang hanya memiliki kontribusi dengan rata-rata 9% setiap tahunnya.

Defisit APBD dapat mempengaruhi kinerja keuangan Daerah secara negatif, mengurangi kemampuan Daerah dalam mengelola keuangannya secara efektif, karena defisit dapat mengganggu ketahanan fiskal, pengelolaan kekayaan daerah, penggunaan sumber daya dan meningkatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang akhirnya menurunkan tingkat desentralisasi. Pemerintah Daerah biasanya menggunakan penerimaan pembiayaan untuk menutupi kekurangan pendapatan daerah ([Restu & Dahtiah, 2023](#)).

Tabel 2. Tingkat Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2016-2022 (Dalam Miliaran Rupiah)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Kupang	149.87	133.42	149.87	77.52	64.23	41.77	18.09
Kab TTS	222.92	244.35	222.92	77.8	86.45	73.51	29.52
Kab Manggarai Barat	132.53	121.76	70.7	242.99	77.8	37.76	256.56
Kab Sabu Raijua	127.71	205.55	171.3	135.05	115.72	130.46	71.03
Kab Malaka	156.53	63.32	79.3	53.3	102.85	34.62	93.2
Kab Ende	153.31	154.7	71.85	59.72	86.22	55.3	49.3
Kab Lembata	103.57	107.97	42.4	40.6	23.96	21.34	217.9
Kab Sikka	104.05	119.33	41.99	48.03	68.02	93.3	236

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi NTT tertinggi terdapat pada Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022. Hal tersebut sejalan dengan tujuan penerimaan pembiayaan yaitu untuk menutupi atau mengurangi defisit, dimana defisit tertinggi Kabupaten Manggarai Barat terdapat juga pada tahun 2022 sebesar Rp238 Miliar namun sayangnya tidak dapat menutupi besarnya tingkat defisit APBD yang terjadi.

Penyebab terjadinya defisit dalam pengelolaan keuangan pemerintah kota merupakan isu yang perlu diidentifikasi secara mendalam. Informasi ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengelola keuangan pemerintah Kota Kupang secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya defisit anggaran, meningkatkan kinerja Daerah serta mencapai keberlanjutan pemerataan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Apakah Penerimaan Pembiayaan berpengaruh terhadap Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Apakah Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Penerimaan Pembiayaan berpengaruh terhadap Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pengelolaan keuangan daerah, beberapa teori penting dapat menjadi landasan analisis. Pertama, teori *stewardship* menggambarkan bagaimana seorang manajer, atau dalam konteks ini, pemerintah daerah, bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mengoptimalkan kepentingan para pemangku kepentingan, seperti masyarakat dan pemegang saham (Davis et al., 1997). Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola anggaran dengan transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dan pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Kedua, teori keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dikelola baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun oleh pihak lain (Fery, 2022). Ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak untuk memungut pajak dan retribusi, kewajiban untuk membayar tagihan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas, serta pengelolaan kekayaan daerah. Teori ini menjadi kerangka hukum dan operasional bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan mengelola APBD.

Selanjutnya, teori APBD mencakup tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan (Gunawan, 2018). Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Belanja daerah dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung, sementara pembiayaan mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang berdampak pada kas daerah. Teori ini menjelaskan bagaimana anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Selain itu, teori defisit menjelaskan bahwa defisit anggaran terjadi ketika belanja daerah melebihi pendapatan (Handoyo et al., 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, defisit APBD tidak boleh melebihi 3% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Berbagai faktor dapat mempengaruhi defisit APBD, seperti dana perimbangan, belanja daerah, dan penerimaan pembiayaan. Daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada dana perimbangan dari pemerintah pusat cenderung memiliki defisit yang lebih tinggi, sementara belanja daerah yang tidak terkendali juga berkontribusi pada peningkatan defisit. Penerimaan pembiayaan, yang mencakup berbagai sumber keuangan, digunakan untuk menutupi kekurangan pendapatan daerah jika terjadi defisit. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketiga faktor ini secara signifikan mempengaruhi defisit APBD di Provinsi NTT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui website resmi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia (DJPK RI) yaitu <https://djpk.kemenkeu.go.id>.

Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

- Kabupaten/Kota provinsi NTT yang mengalami defisit paling banyak dalam rentang waktu 2016-2022.
- Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prov NTT yang memiliki kontribusi terbesar.
- Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prov NTT yang memiliki kontribusi terbesar.
- Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Prov NTT yang memiliki kontribusi terbesar.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Dana Perimbangan (X1)	Dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut dalam rangka implementasi asas desentralisasi	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rasio
Belanja Daerah (X2)	Bertujuan untuk membiayai kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan	Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung	Rasio
Penerimaan Pembiayaan (X3)	Penerimaan Pembiayaan berarti setiap penerimaan atau pengeluaran yang harus dibayar dan akan dibayar kembali baik pada periode	SILPA Pinjaman Pemerintah Penerimaan Kembali Piutang	Rasio
Defisit APBD (Y)	Terjadi ketika belanja pemerintah melebihi pendapatannya	Pendapatan Daerah Belanja Daerah	Rasio

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data diolah menggunakan aplikasi Eviews 12.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Chow

Tujuannya adalah untuk menentukan model mana yang terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.183644	(7,29)	0.0007
Cross-section Chi-square	32.458969	7	0.0000

Sumber: Diolah menggunakan aplikasi Eviews 12

Nilai prob $0,0000 < 0,05$, maka yang terpilih adalah model FEM

Uji Hausman

Untuk menentukan apakah model mana yang lebih baik, apakah itu model *Fixed Effect Model* (FEM) atau metode *Random Effect Model* (REM).

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.192368	3	0.0006

Sumber: Diolah menggunakan aplikasi Eviews 12

Nilai Prob $0,0006 < 0,05$, maka yang terpilih adalah FEM. Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Multikolinearitas

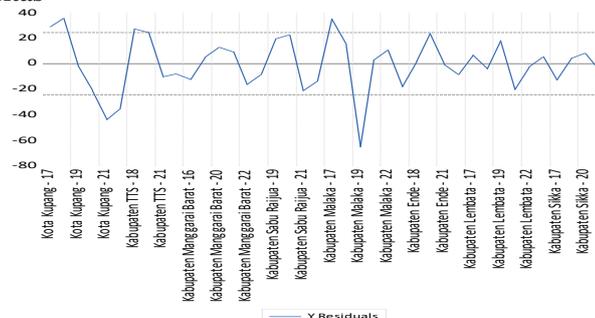
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.886497	-0.084060
X2	0.886497	1.000000	0.134387
X3	-0.084060	0.134387	1.000000

Sumber: Diolah menggunakan aplikasi Eviews 12

Koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar $0,886497 < 0,90$, X1 dan X3 sebesar $-0,084060 < 0,90$, X2 dan X3 sebesar $0,134387 < 0,90$ Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik residual dapat dilihat tidak melewati batas (500 dan -500), artinya varian residual sama. Oleh sebab itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas.

Persamaan Regresi

$$Y = 265.9 + 0.03*X1 - 0.28*X2 - 0.44$$

Defisit APBD (Y) dipengaruhi oleh Dana Perimbangan (X1), Belanja Daerah (X2), dan Penerimaan Pembiayaan (X3) dengan persamaan $Y = 265,9 + 0,03*X1 - 0,28*X2 - 0,44*X3$. Nilai konstanta 265,9 menunjukkan bahwa tanpa pengaruh ketiga variabel tersebut, Defisit APBD meningkat 26590%. Peningkatan 1% pada X1 menyebabkan Y naik 3%, sedangkan peningkatan 1% pada X2 dan X3 masing-masing menurunkan Y sebesar 28% dan 44%. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah sangat bergantung pada keseimbangan ketiga variabel tersebut.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/19/24 Time: 06:15
Sample: 2016 2022
Periods included: 7
Cross-sections included: 8
Total panel (unbalanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	265.9556	59.56016	4.465327	0.0001
X1	0.034499	0.061591	0.560132	0.5797
X2	-0.279632	0.051407	-5.439542	0.0000
X3	-0.446720	0.080752	-5.531983	0.0000

Sumber: Diolah menggunakan aplikasi Eviews 12

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap defisit APBD Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur secara parsial adalah sebagai berikut: (a) Dana Perimbangan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap defisit APBD, ditunjukkan oleh thitung $0,560132 < t_{tabel} 2,024394$ dan nilai sig. $0,5797 > 0,05$; (b) Belanja Daerah (X2) berpengaruh signifikan terhadap defisit APBD dengan thitung $5,439542 > t_{tabel} 2,024394$ dan sig. $0,0000 < 0,05$; (c) Penerimaan Pembiayaan (X3) juga berpengaruh signifikan terhadap defisit APBD dengan thitung $5,531983 > t_{tabel} 2,024394$ dan sig. $0,000 < 0,05$.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.803510	Mean dependent var	-37.47000
Adjusted R-squared	0.735755	S.D. dependent var	47.74022
S.E. of regression	24.54074	Akaike info criterion	9.466962
Sum squared resid	17465.18	Schwarz criterion	9.931404
Log likelihood	-178.3392	Hannan-Quinn criter.	9.634890
F-statistic	11.85905	Durbin-Watson stat	1.914853
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Diolah menggunakan aplikasi Eviews 12

Nilai F_{hitung} sebesar $11,85905 > F_{tabel}$ yaitu 2.866266 dan nilai sig. $0,000000 < 0,05$, maka H_4 diterima, artinya Variabel Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Penerimaan Pembiayaan berpengaruh secara simultan terhadap Defisit APBD Pemerintah Daerah Kab/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.803510	Mean dependent var	-37.47000
Adjusted R-squared	0.735755	S.D. dependent var	47.74022
S.E. of regression	24.54074	Akaike info criterion	9.466962
Sum squared resid	17465.18	Schwarz criterion	9.931404
Log likelihood	-178.3392	Hannan-Quinn criter.	9.634890
F-statistic	11.85905	Durbin-Watson stat	1.914853
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Diolah menggunakan aplikasi Eviews 12

Nilai R-squared sebesar 0,803510 atau 80,351%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Penerimaan Pembiayaan mampu menjelaskan Variabel Defisit APBD Pemerintah Daerah Kab/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 80,351%, sedangkan sisanya yaitu 19,649% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Lain-Lain yang sah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan Terhadap Defisit APBD

Dana Perimbangan memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun demikian, Dana Perimbangan tidak sepenuhnya mampu menutupi defisit APBD. Defisit terjadi jika pemerintah daerah melakukan belanja yang melebihi pendapatan, terutama jika belanja tersebut tidak produktif atau tidak terduga. Defisit ini lebih mencerminkan pengelolaan keuangan yang kurang optimal daripada sekadar rendahnya penerimaan dari Dana Perimbangan.

Meskipun Dana Perimbangan menambah pendapatan daerah, defisit bisa tetap terjadi jika belanja tidak dikelola dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa defisit APBD lebih dipengaruhi oleh pengelolaan pendapatan dan belanja daripada jumlah Dana Perimbangan yang diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian ([Verawaty et al., 2020](#)) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian ([Dianniar, 2023](#)) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif terhadap defisit APBD.

Belanja Daerah Provinsi NTT terus meningkat setiap tahun, namun peningkatan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan daerah, mengakibatkan kemampuan keuangan daerah masuk dalam kategori rendah ([Frederic et al., 2021](#)). Peningkatan belanja ini tidak berhasil mengangkat Provinsi NTT dari kategori provinsi termiskin selama 10 tahun terakhir dan belum mampu memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika defisit APBD terus berlanjut, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum maksimal dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian ([Restu & Dahtiah, 2023](#)), ([Amirullah et al., 2024](#)) yang menemukan bahwa Belanja Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap defisit APBD.

Penerimaan Pembiayaan, meskipun lebih besar dari tingkat defisit APBD, belum mampu menutupinya secara keseluruhan. Ketergantungan pada pinjaman atau sumber pendapatan lain dapat mempengaruhi stabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat penerimaan pembiayaan guna menjaga keseimbangan APBD.

Secara keseluruhan, jika Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan tidak mampu menutupi defisit APBD, ini menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menyusun APBD untuk menghindari ketidakefektifan yang dapat menyebabkan defisit berkepanjangan. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi variabel-variabel tersebut secara simultan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengurangi defisit APBD, perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah dengan mengoptimalkan alokasi dana pada prioritas penting dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Penerimaan pembiayaan dapat ditingkatkan melalui pendapatan asli daerah, penerimaan pinjaman, dan sumber lain yang sah untuk mengurangi ketergantungan pada Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan berpengaruh simultan terhadap Defisit APBD, di mana Dana Perimbangan berkontribusi secara tidak langsung, sementara Penerimaan Pembiayaan hanya mengurangi, bukan menutupi, defisit APBD

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, S., Edy, S. A., & Mus, S. F. (2024). Pengelolaan Keuangan Daerah: Sebuah Kajian Fenomenologi terhadap Defisit Anggaran Kabupaten Majene. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 09–18. <https://doi.org/10.31963/akunsika.v0i0.4509>
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Dianniar, U. (2023). Analisis Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *ABDI EQUATOR*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.26418/abdiequator.v3i1.67382>
- Digdowiseiso, K., & Kaliwattu, D. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal Dan Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 219–228. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.573>
- Fery, I. (2022). Local Government Financial Ability in Doing Regional Loans in The Covid-19 Pandemic Era. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 12(1), 11–24. <https://doi.org/10.34010/jika.v12i1.6757>
- Fitriani, D., Hafizrianda, Y., & Purba Riani, I. A. (2019). Analisis Kemandirian Fiskal Di Kabupaten Jayapura. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 3(3), 32–41. <https://doi.org/10.52062/keuda.v3i3.702>
- Frederic Winston Nalle; Kamilaus K. Oki; Putra M.M. Sangaji. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah provinsi nusa tenggara timur. *INOVASI, Vol 17, No 1 (2021): Februari*, 184–197.
- Gunawan, S. E. (2018). *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang*. 4(3).
- Handoyo, R. D., Erlando, A., & Astutik, N. T. (2020). Analysis of twin deficits hypothesis in Indonesia and its impact on financial crisis. *Heliyon*, 6(1), e03248. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03248>
- Imamah, N., Suman, A., & Khusaini, M. (2020). *Does Regional Government Spending Boost Economic Growth: In an Era of Fiscal Decentralization?* 7(19).
- Nisa Batu Bara, K., Nelsari Malau, Y., Novita Sirait, D., & Marijun Sianturi, E. (2022). Pengaruh PDRB, dana perimbangan, dan investasi terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 107–116. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.13159>
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243–256. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3526>

- Restu, I., & Dahtiah, N. (2023). Analisis Faktor- Faktor Penyebab Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2019-2021). *Indonesian Accounting Research Journal*, *Vol.4*(1), 9–19.
- Restu, I., & Dahtiah, N. (2023). Analisis Faktor- Faktor Penyebab Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2019-2021). *Indonesian Accounting Research Journal*, *4*(1), 9–19.
- Ulum, M. B., & Gisela Syaputri, A. G. (2021). Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Di Sumatera Selatan. *Mbia*, *20*(2), 111–122. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i2.1383>
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *MBIA*, *19*(1), 21–37. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>